

**Hubungan Kelembagaan Antara Kecamatan dengan Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018
(Studi Kasus di Kecamatan Pauh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Jurusan
Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas**



Pembimbing I : Dr. Asrinaldi M.Si

Pembimbing II : Dr. Tengku Rika Valentina S.IP, MA.

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRACT

Sri Rahmayeni 1410831021. Jurusan ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Dengan Judul Skripsi “ Hubungan Kelembagaan Antara Kecamatan dan Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 (studi kasus di kecamatan Pauh)”. Dibimbing oleh: Dr. Asrinaldi M.Si dan Dr. Tengku Rika Valentina S.IP, MA.

Hubungan kelembagaan kecamatan dengan kelurahan saling mempengaruhi kelurahan sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, menyebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintah umum sehingga, konsekuensinya lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota tetapi langsung kepada kecamatan. Artinya, lurah menjadi salah satu unsur yang berada di tingkat kecamatan dan lurah bertanggung jawab kepada camat. Kondisi ini mengakibatkan hubungan kerja camat dan lurah, yang selama ini bersifat koordinasi menjadi atasan dan bawahan. Namun, belum terwujudnya tugas pemerintahan daerah yang efektif dan optimal, di perlukannya upaya penguatan kelembagaan antara kecamatan dan kelurahan untuk bekerjasama untuk menjadi kelembagaan yang mengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model Kelembagaan Antara Kecamatan dengan Kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan pendalaman dokumen-dokumen.. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal hubungan kelembagaan antara kecamatan dengan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tentang kecamatan saling mempengaruhi. Kelurahan yang semula sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Kemudian, hal lainnya yang peneliti temukan ialah perubahan anggaran kelurahan dari yang semula dari kabupaten/ kota menjadi bersumber dari kecamatan, ini yang menyebabkan kelurahan kewalahan dalam masalah anggaran.

Kata kunci: kelembagaan, Organisasi, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

Sri rahmayeni 1410831021. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, With Thesis Title "Institutional Relations Between Subdistricts and Kelurahan Based on Government Regulation no. 17 of 2018 (case study in Pauh sub-district)". Supervised by: Dr. Asrinaldi M.Si and Dr. Tengku Rika Valentina S.IP, MA.

The institutional relationship between the sub-district and the kelurahan influences the kelurahan as a regional apparatus at this time to become a subdistrict apparatus. In Government Regulation No. 17/2018, it is stated that the sub-district is a district/city regional apparatus as well as the general government administrator so that consequently the lurah is no longer responsible to the regent/mayor but directly to the sub-district. This means that the lurah becomes one of the elements at the sub-district level and the lurah is responsible to the camat. This condition resulted in the working relationship between the sub-district head and the lurah, which had been coordinating to become superior and subordinate. However, the task of effective and optimal local government has not yet been realized, so efforts are needed to strengthen institutions between sub-districts and sub-districts to work together to become developing institutions. This study aims to describe and analyze the institutional model between sub-districts and sub-districts. This study uses a qualitative method with a descriptive type. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and deepening of documents. In selecting research informants, the researcher used purposive sampling technique. The results of the study indicate that in terms of institutional relationships between sub-districts and urban villages based on Government Regulation No. 17 of 2018 concerning sub-districts, they influence each other. The Kelurahan which was originally a regional apparatus is now a subdistrict apparatus. Then, another thing that the researchers found was the change in the village budget from the original district/city sourced to the sub-district, this caused the kelurahan to be overwhelmed in budget problems.

Keywords: institutional, organization, local government